

SATU GENERASI PEMBANGUNAN DI ASIA — Suatu Evaluasi Singkat

Kirdi DIPOYUDO

Salah satu perkembangan penting dalam generasi terakhir ini ialah munculnya Asia menjadi unsur vital dan bahkan menentukan dalam percaturan politik dunia. Dalam hubungan ini Perang Dunia II merupakan garis pemisah antara dua periode sejarah umat manusia, periode Eropa dan Atlantik dan periode Asia Pasifik. Sesudah perang itu kita memasuki suatu periode baru di mana kejadian-kejadian di Asia, pendapat-pendapat Asia, dan keputusan-keputusan yang diambil di Asia sangat mempengaruhi jalannya kejadian-kejadian lainnya di dunia. Bangsa-bangsa Asia memainkan peranan yang semakin penting dalam urusan-urusan dunia dan pendapat-pendapat serta sikap-sikap mereka lebih diperhatikan dan ditampung.

Kini sudah satu generasi sesudah Perang Dunia II dan bangsa-bangsa Asia yang sebelumnya dijajah negara-negara imperialis Barat telah mengalami kemerdekaan selama dua puluh tahun lebih. Selama itu pula mereka mengerahkan tenaga dan modal untuk membangun perekonomian mereka dalam kesadaran bahwa kemerdekaan politik mereka harus diisi dengan pembangunan demi masa depan yang lebih sejahtera bahwa kemerdekaan politik itu harus disusul dengan kemerdekaan ekonomi. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi tidak banyak berarti dan tidak lengkap. Maka

pada tempatnya kita berusaha menilai apa yang telah terjadi dalam bidang ekonomi dan membicarakan implikasi-implikasi pembangunan ekonomi itu bagi rakyat-rakyat yang bersangkutan.¹

1. STRATEGI PEMBANGUNAN DIPERSOALKAN

Sesuatu yang beberapa tahun belakangan ini banyak menarik perhatian ialah bahwa ramai dipersoalkan bukan hanya strategi pembangunan yang dianut selama ini melainkan juga proses pembangunan itu sendiri. Sikap skeptis terhadap relevansi sebagian besar kebijaksanaan dalam bidang ini dapat disambut dengan gembira. Kekecewaan-kekecewaan sehubungan dengan Dasawarsa Pembangunan PBB sudah barang tentu ikut menimbulkan suatu realisme baru. Menjelang akhir Dasawarsa itu mulai disadari bahwa sebagai keseluruhan "dunia mungkin tidak lebih dekat dengan kemenangan atas penderitaan yang kelewat parah daripada sebelumnya. Kenyataannya bagi kebanyakan rakyat di dunia pembangunan merupakan suatu impian belaka jika bukan suatu mimpi yang menakutkan". Demikian Prof. Denis Goulet.² Di negara-negara maju di mana indikator-indikator konvensional seperti pendapatan nasional kotor dan pendapatan per jiwa telah meningkat, banyak ahli ekonomi seperti E.J. Mishan menggarisbawahi bahwa pertumbuhan tak terbatas di dunia terbatas adalah tidak mungkin. Mereka menekankan biaya kemanusiaan dan ekonomi sebagian besar perkembangan akhir-akhir ini, dan bersama-sama dengan ahli-ahli ekonomi Amerika Serikat seperti Lekachman, menandakan bahwa GNP tidak berguna sama sekali sebagai indeks kesejahteraan ekonomi orang-orang. Lebih dari itu, Richard Wilkinson menantang arogansi kultural dengan mana masyarakat-masyarakat "maju" menjual gagasan mereka mengenai perkembangan atau kemajuan kepada masyarakat-masyarakat lain, dan melontarkan suatu tesis bahwa dengan ukuran input kerja manusia dan energi masyarakat-masyarakat maju tidak seefisien masyarakat-masya-

1 Karangan ini sebagian besar diambil dari Keith Buchanan, "Asia and The Pacific," dalam *The Far East and Australasia 1974* (London, 1974), hal. 3-18

2 Denis Goulet, "The Disappointing Decade of Development," dalam *The Center Magazine*, September 1969

rakat terbelakang. Ditandaskannya, bahwa banyak hal yang biasanya dipandang sebagai indikator kemajuan dan perkembangan hanya merupakan usaha kompensasi bagi kekayaan yang hilang dengan membusuknya masyarakat tradisional. Selanjutnya dia menyimpulkan bahwa perkembangan mendatang tidak dengan sendirinya akan menghapus kemiskinan, mengurangi penderitaan atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.¹

Gambaran kasar ekonomi tiga puluh tahun terakhir ini memang menunjukkan adanya suatu pergeseran yang terus menerus dari kesempatan kerja pertanian ke kesempatan kerja lain di negeri-negeri Asia Bebas. Bahwa perubahan sektoral itu lebih berarti suatu pemindahan kemiskinan dari desa-desa ke kota-kota daripada suatu perbaikan dalam produktivitas dan kesejahteraan di seluruh perekonomian ditegaskan dalam komentar hati-hati laporan-laporan PBB. Bagi 70% penduduk Asia Bebas rupanya tiada perbaikan taraf hidup yang berarti. Mutu pangan mereka tidak lebih tinggi daripada tahun 1930-an dan perumahan mereka tetap buruk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menghapus kemajuan ekonomi karena sehubungan dengan keadaan sosial politik massa tenaga kerja bukanlah suatu faktor kemajuan seperti di Cina misalnya melainkan salah satu hambatan pokok dan suatu beban yang berat. Walaupun pemerintah-pemerintah menginginkan dan memperjuangkan kemerdekaan ekonomi, ketergantungan pada barang-barang dan teknologi asing meningkat karena industrialisasi didasarkan atas barang-barang konsumsi, dan suatu kebijaksanaan produksi pengganti impor menimbulkan kebutuhan akan barang-barang modal buatan asing dan akan teknologi asing. Kenyataan bahwa banyak industri barang-barang konsumsi itu adalah di tangan cabang firma-firma asing dan bantuan serta investasi asing mengikat negara-negara yang bersangkutan dengan perekonomian negara-negara maju, meningkatkan ketergantungan itu. Lagi pula industri-industri konsumsi tidak berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan petani atau massa di kota-kota tetapi pada kebutuhan suatu kelompok elit yang kecil. Perkembangan industri-industri itu kerap kali disebutkan sebagai bukti bahwa bangsa-

1 Lihat Richard Wilkinson, *Poverty and Progress* (London, 1973)

bangsa Asia telah mencapai tahap "take off" ekonomi. Akan tetapi orang lupa bahwa setelah kebutuhan dipenuhi laju pertumbuhan tidak dapat dipertahankan karena komoditi-komoditi yang dihasilkan kurang relevan bagi kesejahteraan kaum tani atau rakyat banyak di kota-kota, dan daya beli kelompok-kelompok itu tetap rendah. Bukan saja industri-industri yang padat modal itu kurang diintegrasikan dengan kerajinan-kerajinan rakyat yang padat karya atau dengan pertanian, tetapi meningkatnya ratio modal tenaga kerja dan meningkatnya produksi yang sehubungan dengan perkembangannya mengakibatkan munculnya suatu sektor penduduk di kota-kota besar yang secara ekonomis mendapatkan keuntungan istimewa. Kemakmuran kelompok yang diistimewakan ini merupakan suatu kontras tajam dengan massa di sektor kerajinan dan pelayanan, termasuk pesuruh, pelayan bar dan restoran, sopir taksi, penjaja barang kelontong dan pembantu rumah tangga yang tinggal di kampung-kampung jembel.

Secara demikian masyarakat-masyarakat di Asia mengalami suatu polarisasi yang semakin meningkat karena pertumbuhan di sektor enklave modern menimbulkan perbedaan-perbedaan ekonomi dan sosial yang semakin besar dan bahaya meningkatnya konflik sosial karena semakin banyak penduduk menyadari bahwa dalam susunan kelas yang ada itu mereka tidak akan dapat mengatasi kemiskinan dan memulai pembangunan nasional yang sungguh-sungguh. Keadaan Asia Bebas selama seperempat abad sesudah Perang Dunia II telah dianalisa Gunnar Myrdal secara saksama dalam karya monumentalnya *Asian Drama*. Antara lain dia menandaskan: "Kesengsaraan masa rakyat dalam perekonomian-perekonomian yang kurang berkembang di Asia Selatan telah cukup serius bila pendapatan dibagi secara merata Tingkat tinggi perbedaan berarti bahwa mayoritas besar di setiap bangsa terpaksa menyambung nyawa dengan suatu pendapatan tahunan yang lebih kecil dari pendapatan nasional rata-rata yang sudah tidak mencukupi. Terlepas dari kasarnya bukti empiris hal itu tidak dapat dan de facto tidak menyembunyikan adanya suatu kemiskinan masif".¹

1 Gunnar Myrdal, *Asian Drama, An Inquiry into the Poverty of Nations* (Penguin Books, 1968), jilid I, hal. 565-566

Orang mungkin dapat mengemukakan sebagai sanggahan bahwa statistik ekonomi menunjukkan suatu laju pertumbuhan yang mengesankan dan secara demikian menolak gambaran tersebut. Akan tetapi dengan adanya tekanan lebih besar atas perkembangan perekonomian-perekonomian Asia daripada atas perkembangan rakyat-rakyat Asia, suatu gambaran statistik yang mengesankan dapat dan kerap kali juga menyembunyikan kelestarian keterbelakangan dan memburuknya keadaan bagi rakyat banyak. Bukan saja gambaran itu menyembunyikan meningkatnya perbedaan-perbedaan sosial tetapi juga meningkatnya perbedaan-perbedaan regional yang dapat membahayakan kestabilan politik, bahkan eksistensi negara-negara Asia, yang dengan susah payah sejauh ini berhasil membela kelangsungan hidupnya. Di India pada tahun 1960-an GNP meningkat 50%, tetapi suatu studi baru-baru ini menunjukkan bahwa 40-50% penduduk mempunyai pendapatan per jiwa di bawah garis kemiskinan. Lagi pula pendapatan per jiwa kelompok itu telah menurun sedangkan pendapatan per jiwa rata-rata meningkat. Di Filipina GNP meningkat 7% setahun pada tahun 1960-an tetapi perbedaan-perbedaan regional antara Luzon dan Mindanao menjadi lebih besar, dan hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam pemberontakan di Filipina Selatan. Di Pakistan laju pertumbuhan 6% setahun dalam dasawarsa yang sama dibarengi dengan meningkatnya pengangguran, menurunnya upah dengan sepertiga di sektor industri, dan meningkatnya dua kali lipat perbedaan pendapatan per jiwa di Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Mengenai hal ini Mahbub ul Haq memberikan komentar berikut: "pada tahun 1968 ketika dunia internasional masih memuji Pakistan sebagai model pembangunan sistemnya meledak".¹ Ledakan itu adalah akibat faktor-faktor politik maupun ekonomi.

2. JEPANG DAN NEGARA NEGARA SOSIALIS ASIA

Berlainan dengan pola perkembangan ini adalah pola perkembangan Jepang dan negara-negara sosialis di Asia. Pada

1 Mahbub ul Haq, "Employment in the 1970's: A New Perspective," dalam *International Development Review*, No. 4, 1971. Lebih lanjut lihat bukunya *The Strategy of Economic Planning. A Case Study of Pakistan* (Karachi, 1963).

waktu yang sama terdapat perbedaan besar antara Jepang yang mengutamakan pertumbuhan GNP dan Cina yang mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak. Antara lain akibat perang Korea dan Vietnam, GNP Jepang kini adalah yang paling tinggi di dunia bebas sesudah Amerika Serikat. Perkembangannya berdasarkan perluasan pasaran di Asia Selatan dan Asia Tenggara, untuk sebagian berkat strategi Dulles yang menggunakan Jepang untuk membendung usaha-usaha dagang komunis di kawasan, dan atas kekayaan alam Asia Tenggara serta Australasia. Pada tahun 1970 misalnya 40% impor biji besi Jepang berasal dari Australia. Kemajuan perkembangan Jepang sejak 1945 semakin mengintegrasikan perekonomian-perekonomian terbelakang kawasan Pasifik Barat, yang membujur dari Australia sampai Korea Selatan, dalam perekonomian industri Jepang yang sangat maju. Sesuai dengan itu banyak orang melihat Jepang sebagai pemimpin masyarakat pertahanan dan pembangunan Asia Pasifik di masa depan.

Akan tetapi waktu belakangan ini muncul tiga faktor yang mungkin akan menghambat perkembangan itu. Pertama, Australia menjadi semakin enggan menjadi sumber bahan mentah semata-mata bagi Jepang, terutama mineral. Kedua, orang mulai mengecam segi-segi negatif ekspansi ekonomi Jepang di Asia Tenggara, dan memberinya julukan "suatu binatang ekonomi". Orang-orang mengecam pengusaha-pengusaha Jepang terlalu mengejar keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan negeri-negeri tetangganya. Ketiga, secara terlambat disadari, bahkan juga di kalangan-kalangan Jepang, bahwa keajaiban ekonomi itu banyak minta biaya dekonomi dan kemanusiaan. Pada tahun 1972 dalam *Environmental White Paper* Jepang mengakui: "Masalah lingkungan ini rupanya telah mendekati titik untuk meledak. Degradasi lingkungan merupakan ancaman nyata bagi setiap warga bangsa dan kerugian besar sekali bagi seluruh bangsa."¹ Sementara penulis Jepang mengatakan bahwa dengan menganggap sepi perlunya tindakan-tindakan anti polusi itu pengusaha-pengusaha Jepang mudah mengalahkan saingan-saingannya.

1 *Environmental White Paper of Japan 1972* (Tokyo, 1973)

Pola perkembangan adalah berlainan di negara-negara sosialis Asia, khususnya Cina. Di negara-negara itu kemajuan teknologi adalah kontinu dan bahkan merupakan suatu surprise bagi pengamat-pengamat asing. Dengan menggunakan ukuran konvensional pendapatan per jiwa dan berpegangan pada perkiraan resmi, sementara ahli memperkirakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Cina sejak 1949 adalah 1-4% setahun. Menurut Curtis Ullerich,¹ GNP Cina adalah antara \$ 170.000 dan \$ 190.000 juta dengan nilai dollar tahun 1952. Oleh sebab itu pertumbuhan tahunan adalah lebih dari 10% dan dalam 20 tahun GNP telah meningkat sampai 5 kali lipat. Tetapi pada waktu yang sama Ullerich menandakan bahwa Cina tidak mengutamakan GNP seperti dunia Barat, tetapi penghapusan perbedaan-perbedaan sosial dan secara demikian juga perbaikan mutu hidup rakyat secara menyeluruh. Mengingat prioritas itu dan luasnya dasar kekayaan alamnya, Cina tidak mengenal nafsu untuk mencari pasaran dan bahan mentah yang menjadi ciri perekonomian kapitalis Jepang. Pembangunan Cina untuk sebagian besar berorientasi ke dalam negeri. Lagi pula, betapa tinggipun laju pertumbuhannya, sejak revolusi kebudayaan Maois pembangunan ekonomi Cina tidak hanya memperkecil arti peningkatan produksi sebagai tujuan tetapi dengan sengaja dan secara positif menekankan pembangunan ekonomi sebagai suatu faktor untuk menciptakan "manusia sosialis baru". Hal itu antara lain menuntut suatu kebijaksanaan "untuk membangun atas yang paling buruk", yang secara diametral berlawanan dengan tendensi kapitalis "untuk membangun atas yang paling baik", yaitu yang paling cepat menguntungkan. Perencanaan-perencanaan Cina rupanya bertekad untuk menjalankan kebijaksanaan "mengubah manusia", juga jika hal itu untuk jangka pendek berarti laju pertumbuhan ekonomi yang rendah. Untuk jangka panjang mereka percaya bahwa rasa sepi ing pamrih dan rasa tujuan atau motivasi kuat yang ditanam dalam "manusia baru" akan melepaskan suatu cadangan entusiasme, energi dan kreativitas yang besar sekali, dan bahwa semuanya itu akan menciptakan kemungkinan untuk semakin meningkatkan pem-

1 Lihat Curtis Ullerich, "Size and Composition of the Chinese GNP," dalam *Journal of Contemporary Asia* (London, No. 2, 1971). Lihat juga karangannya "China's GNP Revisited: Critical Comments on a Previous Estimate," *loc. cit.*, No. 1, 1973

ANALISA

bangunan sosialis. Kesaksian kumulatif banyak ahli ekonomi dan tokoh bisnis Barat yang tahun-tahun belakangan ini mengunjungi Cina seperti Galbraith memperkuat perkiraan itu dan menunjang kesimpulan Curtis Ullerich berikut: "Cina rupanya telah menemukan kunci bagi akselerasi pembangunan dan bagi masalah mengatasi keterbelakangan material dalam jangka waktu yang dapat diterima." Jika demikian halnya, maka arti prestasi teknologi Cina di bidang nuklir tidak seberapa dibandingkan dengan arti jangka panjang dari apa yang disebut dengan istilah Cina "bom atom spiritual" gagasan Maois. Lagi pula tantangan masyarakat baru ini, dengan penolakannya terhadap prioritas-prioritas dan motivasi-motivasi lama dan dengan tekanannya atas "orang-orang" daripada atas "barang-barang" tidak hanya terbatas pada Jepang dan negara-negara tetangga Cina di Asia lainnya. Di dunia di mana degradasi ekologi dan pengotoran rupanya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi, sukses Cina menyebarkan teknologi sedang yang efisien di seluruh daerah pedalaman dan pencegahan pemborosan dalam konteks industri dan perkotaan tertentu adalah suatu prestasi yang dapat dipelajari bahkan oleh masyarakat-masyarakat yang paling maju sekalipun.

3. TEORI PEMBANGUNAN KIRANYA PERLU DITINJAU KEMBALI

Hasil-hasil pembangunan yang mengecewakan di negara-negara Asia Bebas, yang menganut ekonomi liberal, mendorong kita untuk meninjau kembali seluruh konsep pembangunan di Asia, dan mungkin juga di negara-negara yang maju.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, sejauh ini pembangunan dilihat sebagai suatu proses dari keadaan kurang berkembang menuju keadaan yang lebih berkembang. Untuk mudahnya, biarpun kurang realistis, kemajuan diukur dengan berbagai indikator teknologi seperti produksi baja atau konsumsi energi atau juga dengan GNP. Pembangunan terlalu banyak dilihat sebagai suatu usaha untuk secepat mungkin meningkatkan GNP dan segala sesuatu dikerahkan untuk mencapai sasaran itu. Makin besar GNP makin baik. Itulah pendapat yang domi-

nan selama ini. Orang lupa bahwa pembangunan atau perkembangan ekonomi dapat menciptakan bencana di samping kesejahteraan, bahwa sebagai akibatnya perbedaan-perbedaan sosial dan regional dapat meningkat dan kebudayaan dapat mengalami kehancuran. Akan tetapi pengalaman di Asia dan bagian Dunia Ketiga lainnya selama ini menunjukkan bahwa suatu tingkat pertumbuhan tinggi bukan jaminan terhadap memburuknya kemiskinan dan ledakan-ledakan ekonomi, dan bahwa meningkatnya pendapatan per jiwa dapat bersama-sama dengan menurunnya kesejahteraan sosial, atau paling tidak dengan meningkatnya kekecewaan sosial.

Keadaan semacam itu memberikan isyarat kepada perencana-perencana Asia dan guru-guru mereka agar menolak konsep pembangunan yang mereka terima tetapi jelas kurang tepat, yaitu konsep bahwa perkembangan adalah sesuatu yang dapat diukur dengan indikator-indikator produksi, dan sebaliknya melihat perkembangan sebagai suatu proses menuju perkembangan penuh semua orang sebagai manusia. Dengan demikian mereka hendaknya menolak konsep pembangunan sebagai suatu proses untuk mencapai GNP sebesar mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena proses serupa itu akan menghasilkan apa yang disebut "pertumbuhan tanpa perkembangan", suatu kondisi di mana perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi antara kelas-kelas dan daerah-daerah menjadi semakin besar. Jurang dalam taraf hidup dan kesejahteraan antara belahan utara bumi atau pusat dan belahan selatan atau periferi, yang biasa disebut Dunia Ketiga, menjadi semakin lebar karena pertumbuhan di pusat menciptakan keadaan kurang berkembang di periferi. Selain itu di Dunia Ketiga itu sendiri proses pertumbuhan ekonomi juga menciptakan gejala pusat - periferi dalam skala yang lebih kecil. Hal ini antara lain kita lihat dalam melebarnya jurang perbedaan antara Bangkok dan bagian timur laut Thailand, antara pantai barat Malaysia dan bagian timur lautnya, antara Luzon dan Mindanao di Pilipina, dan antara Jakarta dan Jawa Tengah di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang menakutkan ialah apakah atau sampai kapan berjuta-juta orang itu akan membiarkan politik pembangunan yang tidak atau kurang memperhatikan mereka dan kurang mengikutsertakan mereka dalam usaha menentukan nasib mereka.

Alternatifnya antara lain telah dirumuskan oleh Mahbub ul Haq, seorang penasihat senior Bank Dunia, sebagai berikut: "masalah pembangunan harus diatasi sebagai serangan selektif atas bentuk-bentuk kemiskinan yang paling parah Kita dilatih untuk mengembangkan GNP karena GNP akan memecahkan kemiskinan. Marilah membaliknyanya dan mengatasi kemiskinan karena usaha ini akan meningkatkan GNP. Dengan perkataan lain, marilah lebih memikirkan isi GNP daripada laju pertumbuhannya".¹ Dalam rangka itu "kesempatan kerja harus menjadi sasaran utama perencanaan". Suatu negara yang prestasinya dalam bidang ekonomi paling relevan untuk negara-negara Asia lainnya ialah Cina, yang berhasil mewujudkan "penempatan penuh (full employment) dan pembagian wajar pendapatan pada tingkat pendapatan per jiwa yang rendah". Kiranya telah tiba saatnya untuk membuang retorik pengamat-pengamat Cina dan mengadakan suatu analisa yang lengkap dan obyektif tentang pengalaman Cina. Sebagai seorang ahli pembangunan Asia dia mengemukakan bahwa orang-orang Asia telah bosan dengan gagasan-gagasan lama yang dipermak dan teori-teori lama yang dihidupkan kembali, bahwa mereka telah menyadari bahwa telah tiba saatnya untuk meninjau kembali teori maupun praktik pembangunan.

Kenyataan-kenyataan Asia pada bagian terakhir abad ke-20 ini tidak akan ditentukan oleh politisi yang kini berkuasa tetapi oleh kaum miskin yang beratus-ratus juta jumlahnya, yaitu para petani dan buruh, yang menuntut perbaikan nasib dan perubahan-perubahan yang akan memungkinkannya. Kemungkinan besar kenyataan itu adalah kenyataan revolusioner.

Dalam masyarakat Jepang yang dengan cepat mencapai kemajuan yang tinggi, laju pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan suatu bencana pengotoran yang cukup besar untuk memancing suatu revolusi di kalangan warganegara yang luas

1 Mahbub ul Haq, *loc. cit.*; lebih lanjut lihat Edgar Owens dan Robert Shaw, *Development Reconsidered* (1972); Francis Blanchard, "New Development Strategies to Combat Unemployment and Poverty," dalam *The New Standard*, 18 Oktober 1975; Enrique Penalosa, "The Need for a New Development Model," *Finance and Development*, Maret 1976; dan *Meeting Basic Needs. Strategies for Eradicating Mass Poverty and Unemployment* (Jenewa: ILO, 1976)

dan semakin radikal. Sebuah harian menulis:

"Banyak gerakan warganegara melawan pengotoran dimulai oleh orang-orang yang gelisah dan bukan anggota partai politik manapun Sekali mulai berkembang, gerakan-gerakan independen itu dapat menyerap bermacam-macam orang yang penuh energi Mereka ini menjadi bagian suatu gerakan yang militan dan nampak, yang menunjukkan suatu kekuatan yang besar sekali dan kerap kali melebihi harapan-harapan para pemimpin gerakan itu sendiri. Hal itu rupanya menunjukkan bahwa dalam masyarakat sekarang ini kesempatan telah masak untuk aksi-aksi kekerasan dan pemberontakan".¹

Environmental White Paper Jepang mengatakan bahwa negeri telah mendekati titik untuk meledak, tetapi ledakan itu bersifat sosial politik dan ekologis.

Di negara-negara Asia bukan sosialis lainnya titik bahaya itu terletak dalam masalah kesempatan kerja yang bersumber pada kenyataan, bahwa perekonomian-perekonomian Asia Bebas sekarang ini sangat tidak mampu menyediakan kesempatan kerja kecuali untuk sebagian kecil angkatan kerja, dan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat juga berarti lebih banyak tenaga kerja, sedangkan pengangguran telah mencapai suatu tingkat yang tinggi dan menakutkan. W.H. Pawley meringkas masalah ini sebagai berikut:

"Pengangguran, penuh, maupun setengah, yang timbul dari kepincangan antara orang-orang yang memerlukan pekerjaan dan jumlah modal yang tersedia untuk menempatkan mereka, dan setiap tahun menjadi semakin parah dengan pertumbuhan yang jauh melebihi kesempatan kerja, masalah pengangguran ini, dan bukan kemampuan teknis untuk menghasilkan pangan, merupakan titik bahaya di 90-100 negeri yang didiami 70% penduduk dunia".²

Kebanyakan negara Asia non sosialis termasuk 90-100 negeri itu.

Pembatasan keluarga bukan jawaban bagi masalah pengangguran itu, karena bahkan program keluarga berencana yang paling baikpun tidak akan mempengaruhi besarnya jumlah tenaga kerja selama satu generasi. Dan negara-negara Asia tidak dapat menunggu selama itu. Lagi pula rencana-rencana pembangunan dengan industri-industri padat modal hanya meningkatkan masalahnya. Yang diperlukan ialah teknologi-teknologi padat kerja dalam sektor industri maupun pertanian. Oleh sebab itu diperlukan suatu strategi pembangunan baru di mana perluasan kesempatan kerja dan penempatan merupakan sasaran

1 Dikutip dari Keith Buchanan, "Asia and the Pacific," dalam *The Far East and Australasia 1974* (London, 1974), hal. 13

2 W.H. Pawley, "In the Year 2070," dalam *Ceres*, Juli — Agustus 1971

pokok perencanaan, persediaan tenaga kerja dilihat sebagai suatu kenyataan, dan hal itu dikombinasikan dengan persediaan modal tidak peduli betapa rendahnya produktivitas tenaga kerja dan modal.

Tingkat pengangguran di Asia yang menakutkan itu juga merupakan suatu pemborosan sumber-sumber daya manusia yang berharga. Pemborosan itu dapat diperkirakan meliputi 13.500 juta hari kerja setahun di negara-negara Asia non sosialis.¹ Selanjutnya pemborosan itu adalah salah satu sebab utama kemiskinan dan kepincangan-kepincangan sosial akibatnya. Seperti dapat dilihat dalam pengalaman Cina, potensi kekayaan yang luar biasa itu dapat dikerahkan, dan mobilisasi itu dapat menjadi sarana yang hebat tidak hanya untuk membe-rantas kemiskinan dan meningkatkan produksi dan pendapatan nasional, tetapi juga untuk memungkinkan perkembangan penuh semua orang.

Dalam hubungan ini juga harus dicatat, bahwa pemborosan sumber-sumber daya manusia itu tidak dapat dipertanggung jawabkan, juga karena merupakan benih-benih ketidakstabilan banyak masyarakat di Asia. Adanya kemiskinan yang luas di samping kekayaan dan pola hidup mewah suatu kelompok elit yang kecil akhirnya akan mengakibatkan suatu pergolakan sosial yang dapat menumbangkan sistem-sistem politik dan pemerintahan. Bila massa petani dan buruh menemukan kembali ide sistem kekuasaan, yaitu kebenaran bahwa penderitaan mereka adalah suatu akibat, maka rejim-rejim Asia dan penasihat-penasihat Barat maupun Soviet mereka sudah tidak dapat menawarkan politik pembangunan di mana produksi lebih merupakan krite-riumnya daripada pembangunan untuk rakyat. Akan tetapi mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk melepaskan stra-tegi pembangunan yang lama dan memilih yang baru. Sehubung-an dengan itu kiranya perlu menempuh jalan baru segera mung-kin dan secara demikian mencegah terjadinya pergolakan sosial yang dapat menghancurkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama ini dengan susah payah.

1 Lihat Keith Buchanan, *loc. cit.*

4. PENUTUP

Salah satu gejala yang paling menyolok di negara-negara Asia non sosialis sesudah satu generasi pembangunan ialah adanya polarisasi yang semakin meningkat, baik polarisasi regional antara kota-kota dan enklave-enklave ekonomi modern di satu pihak dan daerah pedesaan di lain pihak maupun polarisasi sosial antara rakyat banyak yang miskin dan suatu golongan elit kecil yang kaya dan mengikuti suatu pola hidup yang serba mewah. Polarisasi itu untuk sebagian besar adalah akibat strategi pembangunan yang berdasarkan ekonomi liberal dan kelemahan aparatur pemerintah.

Dari segi ekonomi, politik pembangunan negara-negara Asia Bebas yang menganut ekonomi liberal ternyata kurang berhasil mengerahkan sumber-sumber nasional, baik sumber-sumber daya alam maupun sumber-sumber daya manusia demi perkembangan sejati. Bahkan politik pembangunan itu meningkatkan kontradiksi-kontradiksi antara bertambahnya kekayaan sedikit orang dan menetapnya kemiskinan rakyat banyak. Untuk sebagian hal itu adalah akibat proses dekolonisasi, yang meninggalkan kekuasaan politik di tangan suatu kelompok kecil yang mendapat pendidikan Barat dan yang politiknya dibatasi pengaruh-pengaruh asing. Mereka ini menggeser dan menggantikan penguasa-penguasa kolonial, tetapi secara sadar atau tidak meniru tingkah laku mereka, tidak hanya dalam pola hidup tetapi juga dalam hubungan dengan rakyat.

Perbedaan-perbedaan itu lebih menonjol karena golongan elite berorientasi pada gaya hidup masyarakat yang telah maju dan kaya, termasuk suatu pola konsumsi yang mewah. Kebutuhan akan barang-barang konsumsi itu dipenuhi lewat impor atau industri lokal modern, dalam cabang-cabang perusahaan-perusahaan asing atau dalam pabrik-pabrik lokal model pabrik-pabrik luar negeri yang dikuasai orang-orang pribumi. Sehubungan dengan itu disusun dan dilaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang lebih berorientasi pada impor atau substitusi impor, yang menuntut suatu orientasi politik pada pemenuhan kebutuhan akan modal dan valuta asing dan pada integrasi dengan negara-negara yang telah maju tempat asal teknologi maupun kesenangan-kesenangan masyarakat industri.

ANALISA

Pendapatan nasional umumnya meningkat tetapi tidak nampak dalam pendapatan di desa-desa tempat tinggal sebagian terbesar rakyat. Pertumbuhan pendapatan baru itu terlalu berpusat di kota-kota besar, dan kurang dikerahkan di daerah pedesaan untuk meningkatkan potensi produksi pertanian dan industri penduduknya. Lagi pula sebagian besar pertumbuhan di kota-kota itu berupa gedung-gedung mewah, hotel-hotel megah, rumah-rumah mahal, kendaraan-kendaraan swasta, tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya, dan secara demikian kurang menunjang pembangunan ekonomi yang seimbang. Sebaliknya terlalu kecil bagian yang digunakan untuk memperluas kesempatan kerja produktif, dan dengan demikian memberantas atau mengurangi pengangguran, yang merupakan salah satu masalah utama negara-negara Asia non sosialis.

Dengan demikian pembangunan di Asia umumnya tidak atau belum mencapai sarannya mewujudkan kesejahteraan yang merata, tetapi memperlebar jurang antara suatu golongan elit yang kecil dan rakyat banyak yang tetap miskin. Perekonomian yang dibangun ternyata tidak mampu menyediakan kesempatan kerja kecuali untuk sebagian tenaga kerja, dan secara demikian juga tidak mampu mengerahkan sumber-sumber kemanusiaan yang berlimpah, sehingga terjadi suatu pemborosan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya karena merupakan sumber utama kemiskinan yang luas dan akibat-akibatnya, melainkan juga mengandung benih-benih pergolakan sosial yang dapat menghancurkan seluruh kemajuan yang telah dicapai.

Untuk mencegah kemungkinan itu menjadi kenyataan, strategi pembangunan kiranya perlu ditinjau kembali. Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada peningkatan GNP harus ditinggalkan dan diganti dengan pandangan yang melihat pembangunan sebagai suatu proses menuju perkembangan penuh semua orang sesuai dengan tuntutan keadilan sosial, tanpa mengabaikan GNP. Dalam strategi baru itu perluasan kesempatan kerja harus menjadi sasaran pokok pembangunan sehingga sumber-sumber kemanusiaan yang berlimpah dapat dikerahkan. Secara demikian negara-negara tidak hanya akan dapat memberantas kemiskinan dan akibat-akibatnya, melainkan juga meningkatkan produksi dan pendapatan nasional dan membaginya secara yang lebih merata.